

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian bangsa. Pengertian bank sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Namun dengan semakin berkembangnya suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan lainnya. Dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutupi kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai potensi ekonomi bangsa. Swastapun secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional dan pembangunan usahanya. Dengan keterbatasan finansial lembaga swasta dan Negara tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Bank sebagai jasa lembaga keuangan tugas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan dapat memenuhi dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga sebelumnya (Swasta dan Negara).

Dalam hal ini Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, tidak hanya sebatas finansial tetapi juga tuntutan moralitasnya, sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Sistem bebas bunga atau yang disebut pula bank islam atau bank syariah memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan islam yang "*Rahmatan lil Alamin*", tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut, bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah merupakan kebutuhannya, namun bagi masyarakat lain, bank islam sebagai alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah ada.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi seperti halnya dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukannya. Seperti bank konvensional salah satu aktifitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan, penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank dan menunjukkan keberpihakan bank bagi perbaikan ekonomi masyarakat pada khususnya. Dan kemajuan ekonomi nasional pada umumnya.<sup>2</sup>

Sementara itu menurut ketentuan umum menetapkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam disebut lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan pada **Al-Qur'an dan Hadist**, atau dengan kata lain, bank islam usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya sesuai syariat islam.<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank islam atau bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktifitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, Bank Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam

---

<sup>2</sup>Ikatan Bankir Indonesia 2015, Bisnis Kredit Indonesia, JAKARTA, PT. Gramedia Pustaka Utama

<sup>3</sup>Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bentuk pembiayaan yang diberikan akan terbayar. Penerima pembiayaan akan mendapat kepercayaan dari pemberi biaya sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai waktu yang telah dijanjikan. Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk lainnya sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya yang dibiayai untuk pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>5</sup>

Pengertian pembiayaan menurut para ahli :

1. Menurut Kasmir

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>2</sup>Drs Ismail, MBA.AK *dasar dalam Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 21

## 2. Menurut M. Syafi'i Antonio

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>6</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebuah bank diwajibkan menggunakan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengertian prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.<sup>7</sup>

The prudential of banking merupakan salah satu fungsi perbankan dalam menjadi lembaga yang menjembatani mereka yang surplus dana pihak defisit. Mereka yang

surplus menempatkan dana dalam bentuk seperti :

---

<sup>6</sup>Permadi Gundapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 21.

<sup>7</sup> Permadi Gundapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 21.

5

- a. Deposito
- b. Tabungan
- c. Obligasi
- d. Saham dan lain-lainnya

Adapun mereka yang defisit menjadikan bank adalah lembaga pencari solusi untuk mengajukan permohonan pinjaman. Proses pinjaman tersebut baru akan diberikan setelah melewati beberapa tahap analisis yang dilakukan oleh pihak penilaian kredit / pembiayaan atau penjelasan obligasi, kasus kredit macet hingga menyebabkan collapasnya sebuah bank menjadi bukti ketidak hati-hatian tersebut terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka penulis mencoba meneliti dalam sebuah tugas akhir (TA) dengan judul **"PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( PRUDENTIAL BANKING ) DALAM RANGKA PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP BRIGJEN KATAMSO"**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaiman Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso ?
2. Apakah Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso telah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apakah manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah :

1. Bagi pihak perbankan diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memahami pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.
2. Untuk menambah pemahaman dan pengembangan pengawasan terhadap penulis khususnya dalam bidang hukum perbankan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia perbankan terkait prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar setiap kegiatan dalam dunia perbankan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

##### **2. Penelitian lapangan**



Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun keobjek penelitian yang diteliti pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso.

3. Adapun tehnik pengumpulan yang dilakukan adalah :

a. Pengamatan ( observasi ), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.

8

b. Wawancara ( interview ), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa Bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis mengeluarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori**

Berisikan tinjauan umum pelaksanaan prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan, dan factor-faktor lainnya.

### **Bab III Gambaran Umum Perusahaan**

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso tersebut.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian ( prudential bankin ) dalam rangka pemberian pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Kcp Brigjen Katamso.

### **Bab V Penutup**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan, saran, dan hasil penelitian yang telah dilakukan.